

PASAR BERINGHARJO DAN MALIOBORO TAK PERLU TUTUP

Simulasi Protokol Harus Sasar Pelaku UKM

YOGYA (KR) - Simulasi protokol kesehatan yang selama ini kerap dilakukan di kalangan perhotelan dan restoran, perlu diperluas. Terutama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor kuliner. Apalagi beberapa kasus temuan positif Covid-19 belakangan ini kerap ditemukan di PKL, warung makan, toko kelontong serta pedagang pasar.

“Kami apresiasi PHRI Yogyakarta yang sering menggelar simulasi protokol di kalangan hotel dan restoran. Tetapi justru celah penularan sekarang banyak di sektor kecil dan menengah. Kami dorong pemerintah bisa memfasilitasi simulasi di sana,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, Selasa (15/9).

Pelaku usaha di tingkat bawah akhir-akhir ini dinilai kerap mengabaikan protokol kesehatan. Edukasi yang lebih gencar di kawasan tersebut

harus segera dilakukan agar celah penularan virus dapat ditekan. Selain itu, proses skrining yang kini mulai kendur juga perlu dipertegas. Terutama menyangkut pengecekan suhu badan serta pemindaian ‘QR Code’ oleh petugas keamanan. Terkait temuan kasus di PKL Malioboro serta pedagang Pasar Beringharjo Timur, menurut Susanto, tidak perlu ada penutupan usaha di kedua ikon Kota Yogya tersebut. Hanya jaminan keamanan harus tetap diwujudkan dengan mem-

perketat protokol yang selama ini menjadi beteng pertahanan dari paparan virus. “Tidak perlu ditutup. Justru petugas di lapangan yang menjadi garda terdepan ini perlu dioptimalkan. Mereka juga harus difasilitasi mengenai jaminan kesehatan, kebutuhan vitamin serta rapid test berkala,” tandasnya.

Sementara Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan pihaknya sempat menutup Pasar Beringharjo Timur selama sehari kemarin untuk penyemprotan disinfektan. Hal ini menyusul temuan kasus positif salah satu pedagang sayur mayur di sana. Selain meliburkan Pasar Beringharjo Timur selama sehari, 18 pedagang yang diketahui kontak erat tengah dilakukan tracing. Kebijakan lebih lanjut juga akan segera diputuskan agar pasar yang men-

jadi ikon Kota Yogya tersebut tetap kondusif dan memberi rasa aman bagi pedagang maupun pengunjung.

Sementara perkembangan hasil tracing PKL di Malioboro, terdapat penambahan enam orang yang positif Covid-19. Dengan begitu, total temuan kasus positif di Malioboro mencapai delapan orang, termasuk satu orang PKL yang pertama kali diketahui positif dan meninggal dunia.

“Saat ini pun kami perluas wilayah tracing Malioboro. Tetapi kasus itu belum bisa dikategorikan sebagai klaster baru, karena temuan positif masih sebatas orang yang kontak erat. Perluasan tracing di Malioboro perlu kami lakukan untuk landasan kebijakan,” imbuhnya.

Sementara untuk klaster Soto Lamongan, upaya tracing sudah selesai dilakukan. Total temuan kasus positif pa-

da klaster ini mencapai 26 orang yang meliputi pedagang, karyawan, anggota keluarga, pembeli serta tetangga. Khusus untuk seorang tetangga penjual Soto Lamongan, pada Minggu (13/9) malam lalu dinyatakan meninggal dunia. Tetangga yang dinyatakan positif dan meninggal dunia tersebut berusia 60 tahun. Sebelumnya bergejala batuk dan panas dan menjalani rawat inap di rumah sakit.

Sedangkan hasil tracing di kawasan Kotabaru, terdapat 20 orang yang menjalani uji swab. Mayoritas merupakan pegawai kelurahan setempat. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif sehingga tidak ada potensi munculnya klaster di Kotabaru. Meski demikian, tracing di sana masih dilakukan agar potensi penularan bisa benar-benar dikendalikan. **(Dhi)-f**

Lift Jatuh, Ketua Dewan Patah Kaki

YOGYA (KR) - Insiden kecelakaan dialami Ketua DPRD DIY Nuryadi Spd dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budiantoro Spd MSi, Selasa (15/9) pagi. Lift yang membawa keduanya dari lantai dua turun bebas, sehingga mereka cedera dan dilarikan ke rumah sakit.

Kedua politisi PDI Perjuangan itu hendak turun ke lantai I menuju Ruang Paripurna, di mana Nuryadi dijadwalkan memimpin Rapat Paripurna pukul 10.00. “Saya sempat bertemu untuk konsultasi terkait urusan kantor dengan Pak Ketua. Lalu beliau naik lift bersama Pak Dwi, dan tiba-tiba lift-nya jatuh,” kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta ST.

Menurut Huda, lift tersebut merupakan sarana darurat yang digunakan oleh Nuryadi, mengingat kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk terlalu sering naik turun tangga. “Itu lift sementara, dan tidak dibangun menggunakan APBD melainkan dana pribadi,” ujarnya.

Kolega Nuryadi dan Dwi, Endah Subekti mengungkapkan bahwa lift berukuran 90 x 90 cm tersebut memang digunakan khusus oleh Nuryadi, mengingat kondisinya yang tidak fit akibat penyumbatan jantung 85 persen. “Oleh dokter tidak disarankan sering naik turun tangga,” ujar Endah.

Menurutnya, Nuryadi saat ini dirawat di RSUP Sardjito, sedangkan Dwi di RS Bethesda. “Kakinya sudah *dirontgen*, dan hasilnya menunjukkan ada yang patah. Kondisinya sudah sadar dan membaik, namun harus istirahat total sesuai standar medis,” tutur Endah yang juga Ketua DPRD Gunungkidul.

Semula diduga jatuhnya lift akibat putus-nya tali sling. Namun hasil pemeriksaan teknisi tidak ada tali yang putus, sehingga insiden itu diduga karena Nuryadi salah prosedur dalam mengoperasikan lift. Lift itu menggunakan saklar manual dengan tuas pengait. **(Bro)-f**

KEBIJAKAN PSBB JAKARTA

Dampaknya Belum Terasa bagi DIY

YOGYA (KR) - Adanya kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dampaknya belum begitu terasa bagi sektor pariwisata di DIY. Selain kebijakan PSBB tersebut baru mulai diberlakukan pada Senin (14/9), kunjungan destinasi yang berasal dari DKI Jakarta berada pada posisi atau urutan lima. Adapun untuk urutan pertama wisatawan



KR-Riyana Ekawati
Singgih Rahardjo

tetap berasal dari DIY, kedua dari Jawa Tengah, ketiga dari Jawa Timur, keempat dari Jawa Barat dan lima DKI Jakarta.

“Kalau dilihat dari sistem yang ada di Visiting Jogja, urutannya seperti itu. Namun seandainya ada pengurus hotel yang menyampaikan terjadi penurunan sebesar 20 persen, saya belum bisa berkomentar banyak, karena PSBB juga baru dilaksanakan Senin (14/9). Jadi, kalau dilihat dari data yang ada visiting Jogja, diprediksikan dampaknya tidak akan terlalu besar karena wisatawan dari Jakarta berada di peringkat kelima,” kata Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Rahardjo di Yogyakarta, Selasa (15/9).

Diungkapkan, jumlah kunjungan wisata cenderung mengalami peningkatan pada saat weekend. Misalnya, jika hari biasa jum-

lah wisatawan hanya berkisar antara 5.000 orang atau 6.000 orang, saat *weekend* bisa naik menjadi puluhan ribu orang. Kendati demikian penegakan protokol kesehatan di destinasi wisata DIY tetap menjadi prioritas utama. Karena sampai saat ini masih diyakini penegakan protokol kesehatan masih menjadi cara efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

“Saat diputuskan ada perpanjangan tanggap darurat kami membuat surat edaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait antisipasi penyebaran penularan Covid-19 di destinasi atau industri pariwisata. Intinya kebijakannya tetap sama dengan Pergub No 48, penegakan protokol kesehatan serta pengetatan didestinasikan dan tidak menerima rombongan dalam jumlah besar,” papar Singgih.

Lebih lanjut Singgih menyatakan, langkah Satpol PP DIY untuk melakukan razia masker bagi masyarakat maupun wisatawan dinilai merupakan langkah efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Tentunya semua itu akan bisa maksimal, apabila diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan. **(Ria)-f**

HINGGA 31 SEPTEMBER 2020

34.733 Kendaraan Bebas Denda PKB

YOGYA (KR) - Kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama masa pandemi Covid-19, dari bulan April-Juni kemudian diperpanjang lagi hingga 31 September 2020, banyak dimanfaatkan warga Kota Yogya. Sampai dengan 31 Agustus 2020, tercatat yang memanfaatkan bebas denda PKB total 34.733 kendaraan terdiri dari 6.151 roda empat dan 28.582 roda dua.

“Kebanyakan terlambat karena dampak Covid-19, tetapi banyak juga yang sudah 2-3 tahun memanfaatkan kesempatan ini. Keterlambatan H+2 kena denda 25 persen dan tiap bulan ditambah 2 persen, setahun denda bisa 49 persen, jadi penghapusan denda PKB sangat menguntungkan warga,” tutur Kepala Kantor Pelayanan Pajak DIY (KPPD/ Samsat) Kota Yogya Dra Karti Peni Mahanani MM kepada *KR*, Selasa (15/9) di kantornya, Jalan Tentara Pelajar 13 Yogya.

Disebutkan nilai denda yang dihapuskan untuk roda empat sebesar Rp 4,220 miliar sedang roda dua senilai Rp 2,065

miliar atau total Rp 6,285 miliar. “Namun bisa memasukkan pendapatan total Rp 22,144 miliar. Juga sebagai pembelajaran kewajiban membayar pajak karena saat ini polisi bisa melakukan tilang karena setiap kendaraan wajib pengesahan ulang,” tegasnya

Samsat Kota Yogya dengan 7 outlet layanan di Galeria Mall, BPD Giwangan Kelurahan Wirogunan, Loret Khusus dan Umum di Samsat Bumijo, serta Samsat Keliling, saat ini rata-rata 2.000 kendaraan melakukan pembayaran PKB setiap harinya. “Kita juga menyiapkan layanan Go Door dan Go Jak untuk jemput bola dengan permintaan masyarakat,” ujarnya

Dikatakan, jumlah pembayaran PKB reguler di masa pandemi Covid-19 terhitung stabil namun untuk balik nama kendaraan baru turun tajam hingga 60 persen. “Bulan Agustus hanya 800 kendaraan baru, sementara Januari-Februari sebelum pandemi rata-rata 2.000 kendaraan, April masih 1200-an kendaraan, Mei-Agustus turun,” terangnya. **(R4)-f**



KR-Ardhi Wahdan

Tri Mardoyo menunjukkan plakat penghargaan atas inovasi layanan yang dia gagas.

YOGYA (KR) - Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya Tri Mardoyo, diusulkan maju dalam ajang ASN Inspiratif 2020. Anugerah ASN yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) itu terbuka bagi seluruh jajaran ASN yang memiliki rekam jejak jabatan, integritas, moralitas serta memiliki inovasi yang dirasakan oleh organisasi atau masyarakat.

“Begitu mendapat informasi Anugerah ASN 2020, pikiran saya langsung tertuju pada sosok Pak Tri Mardoyo. Kemudian kami koordinasikan di internal dinas serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) hingga akhirnya disetujui Bapak Walikota,” tandas Analis Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Yogya Kantoro, Selasa (15/9).

Menurut Kantoro, Tri Mardoyo

sesuai dengan kriteria dalam ajang Anugerah ASN untuk kategori ASN Inspiratif. Salah satunya beragam gagasan yang menelurkan inovasi dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Integritas dan moralitasnya selama mengabdikan sebagai ASN juga tidak perlu dipertanyakan kembali.

Beragam gagasan yang ditelurkan Tri Mardoyo antara lain Yogyakarta Emergency Service (YES) 118 yang kini menjadi Public Safety Centre (PSC) 119 YES, Buku Panduan Pengobatan, layanan psikolog di puskesmas, Rumah Sehat Lansia (Rusela) serta Sistem Kelurahan Siaga Gerakan Masyarakat Sehat (Si Kesi Gemes).

Sementara Tri Mardoyo, mengaku apa yang sudah digagasnya itu tidak mungkin dapat dijalankan tanpa ada sinergi dan kerja sama berbagai pihak. Terutama rekan-rekannya sesama pegawai di lingkungan Pemkot Yogya,



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

PERSEMPIT RUANG GERAK PENULARAN COVID-19

'Tracing' Harus Lebih Massif, Segera Fungsikan Shelter



KR-Istimewa

Bambang Anjar Jalumurti

warga sehingga operasionalnya bisa lebih optimal.

Bambang yang duduk di Komisi D ini mengaku, pihaknya rutin menggelar koordinasi dan supervisi dengan Dinas Kesehatan selaku mitra kerjanya. Diakukannya, temuan kasus baru juga tidak lepas dari hasil *tracing* yang sudah dilakukan. Namun upaya penelusuran memang harus digenarkan agar dapat terpetakan kondisi yang sebenarnya di masyarakat. “Keberhasilan *tracing* membutuhkan kerja sama kita semua. Masyarakat harus kooperatif dan